FASILITATOR PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REVOLUSI MENTAL

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

MODUL PELATIHAN FASILITATOR PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REVOLUSI MENTAL

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Modul Pelatihan Fasilitator Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental

Pengarah:

- Y.B. Satya Sananugraha
- Arif Budimanta
- Prasetyono Widjono
- Dolfie O.F.P
- Ghazali Husni Situmorang
- Haswan Yunaz
- I Nyoman Shuida
- Muhammad Yamin
- Yudi Latief
- Budiarto Shambazy
- Mukhlis Yusuf
- Mohammad Sobari
- Sarlito Wirawan Sarwono
- Adi Prasetyo
- Sony Subrata
- Hamdi Moeloek
- Fajar Riza Ul Haq
- Andreas Hugo Pariera
- Sapto Supono

Penyusun:

- Paulus Wirutomo
- Daisy Indira Yasmine
- Riena Juliannisa Surayuda
- Hertati Suandi

Desain Grafis & Layout:

Deni Murdiani

Penerbit:

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Cetakan I: Mei 2016

ISBN: 978-602-408-004-4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	7
I. PENDAHULUAN	8
II. TUJUAN PELATIHAN	11
III. MATERI PELATIHAN	12
3.1 REVOLUSI MENTAL	13
3.1.1 Apa Itu Revolusi Mental	13
3.1.2 Revolusi Mental sebagai Upaya Pembangunan Sosial-Budaya	16
3.1.3 Tujuan Gerakan Nasional Revolusi Mental	18
3.1.4 Prinsip Gerakan Nasional Revolusi Mental	19
3.1.5 Nilai-nilai Strategis Instrumental Gerakan Nasional Revolusi Mental	20
3.2 PROGRAM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL.....	23
3.2.1 Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental	24
3.2.2 Strategi Gerakan Nasional Revolusi Mental	25
3.2.3 Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2015.....	28
3.2.4 Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2016.....	29
3.2.5 Pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental	30
3.2.6 Peran Strategis Penyelenggaraan Negara..	31

3.3 GERAKAN INDONESIA MELAYANI	33
3.4 GERAKAN INDONESIA BERSIH.....	40
3.5 GERAKAN INDONESIA TERTIB.....	47
3.6 GERAKAN INDONESIA MANDIRI (2017).....	54
3.7 GERAKAN INDONESIA BERSATU (2017).....	60
3.8 GUGUS TUGAS REVOLUSI MENTAL.....	66
3.8.1 Deskripsi Gugus Tugas Revolusi Mental.....	67
3.8.2 Struktur Gugus Tugas Revolusi Mental	68
3.8.3 Visi dan Misi Gugus Tugas Revolusi Mental.....	72
3.8.4 Tujuan Gugus Tugas Revolusi Mental	72
3.8.5 Peran Gugus Tugas Revolusi Mental Nasional	72
3.8.6 Peran Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi.....	74
3.8.7 Strategi Gugus Tugas Revolusi Mental.....	74
3.8.8 Langkah-langkah Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental	76
3.8.9 Kriteria Anggota Gugus Tugas Revolusi Mental.....	77
3.8.10 Metode Pembentukan Gugus Tugas	77
IV. KONSEP PELATIHAN	84
V. EVALUASI PELATIHAN	85
VI. LAMPIRAN	86
DAFTAR PUSTAKA.....	98
TIM PENYUSUN	101

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga modul pelatihan yang berjudul “Fasilitator Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental” dapat diselesaikan.

“Gerakan Nasional Revolusi Mental” diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 14 Agustus 2015. Sebagai sebuah gerakan, maka keterlibatan berbagai komponen masyarakat menjadi kunci keberhasilan utama. Oleh sebab itu, pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental menjadi penting, maka kemampuan fasilitator dalam memfasilitasi pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di provinsi menjadi krusial.

Modul pelatihan ini disusun oleh kelompok kerja, yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai materi pelatihan bagi para fasilitator pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental. Modul ini memuat tentang pengertian dasar, nilai-nilai, tujuan yang ingin dicapai, serta strategi pelaksanaan “Gerakan Nasional Revolusi Mental”, yang akan menjadi suatu gerakan hidup baru dengan perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara bersikap, dan berperilaku setiap orang untuk berorientasi pada Indonesia lebih baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul pelatihan ini jauh dari sempurna. Namun demikian, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga modul ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas dan dapat membuat kita semua mencapai kehidupan yang lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam proses pembuatan modul pelatihan “Fasilitator Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental” ini. Semoga modul pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua.

Tim Penyusun

PENDAHULUAN

Konsep Revolusi Mental yang disampaikan Presiden Joko Widodo ternyata mendapat sambutan luas di masyarakat. Itu artinya rakyat mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia sedang mengalami krisis sehingga untuk segera memperbaikinya diperlukan tindakan yang revolusioner. Secara jujur harus diakui bahwa dewasa ini di dalam survei-survei internasional yang membandingkan kualitas budaya antar bangsa, Indonesia hampir selalu mendapat nilai yang cukup rendah atau bahkan mengalami penurunan dalam hal yang baik, misalnya di tahun 2015 dalam indeks daya saing global Indonesia mendapatkan penurunan dua peringkat menjadi ke-37 dari 140 negara, dan indeks pelaksanaan hak asasi manusia, menurun dari angka 2,49 menjadi 2,45. Sementara itu, justru cenderung memperoleh skor tertinggi dalam hal yang negatif, misalnya tingkat korupsi, konflik antar golongan, dan sebagainya. Relakah kita disebut sebagai “kebudayaan yang terkalahkan”? Apa yang salah dalam budaya bangsa kita?

Menelusuri kembali dan menganalisis kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu secara ilmiah, objektif, dan sistemik memang perlu, tetapi jauh lebih penting membangun tekad untuk membenahi kebudayaan kita. Tawaran “Revolusi Mental” yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan bahwa kita sebagai negara dan bangsa telah memiliki kehendak politik untuk itu. Ajakan Revolusi Mental oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu momentum yang sangat penting dan memberi harapan bagi bangsa Indonesia. Agar Revolusi Mental tidak hanya menjadi slogan kosong, melainkan benar-benar dapat terlaksana dengan sukses mengangkat kembali kejayaan

bangsa Indonesia dalam persaingan di tingkat regional dan global, perlu dirumuskan suatu rencana strategis Revolusi Mental.

Revolusi Mental pertama kali diucapkan oleh Presiden Soekarno pada pidato Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1957 dalam rangka membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan fisik menuju pembangunan mental untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Bung Karno mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan revolusi mental sebagai strategi membangun politik yang berdaulat, perekonomian yang mandiri dan berkepribadian dalam Budaya. mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Untuk merespon masalah mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintahan Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla hadir dengan menawarkan VISI transformatif: **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong (Pancasila)”**. Jadi Revolusi Mental harus berlandaskan pada Pancasila. Strategi yang diambil di dalam Revolusi Mental adalah mengangkat beberapa nilai yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, tetapi lebih populer dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Nilai-nilai itu tidak perlu disakralkan, tetapi bila dilaksanakan akan mampu memiliki daya ungkit bagi mentalitas bangsa Indonesia sehingga mampu berdiri sejajar dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu sebabnya nilai-nilai itu disebut sebagai “nilai strategis-instrumental”. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi justru mendukung agar Pancasila bisa lebih dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo membentuk Pokja Revolusi Mental di Rumah Transisi, melalui diskusi dan jajak pendapat yang melibatkan 300 tokoh masyarakat, telah dipilih enam nilai strategis-instrumental, yaitu 1. Kewargaan, yaitu menyadari hak dan kewajiban, 2. Bisa dipercaya, 3. Kemandirian, 4. Kreativitas, 5. Gotong Royong dan 6. Saling menghargai. Agar nilai-nilai itu lebih mudah dicerna oleh masyarakat banyak, maka Tim Pokja Revolusi Mental di Kemenko PMK telah meringkasnya menjadi tiga yaitu 1. **Integritas** (yang berisi unsur nilai Kewargaan dan bisa dipercaya), 2. **Etos Kerja** (terdiri dari nilai kemandirian dan kreativitas), dan 3. **Gotong Royong** (kerjasama dan saling menghargai).

Saat ini, terdapat tiga alasan utama mengapa Indonesia memerlukan Revolusi Mental: (1) Sudah terlalu lama terjadi praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara-cara tidak jujur; tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, dan tidak bisa dipercaya. Maraknya praktik-praktik tersebut berakibat pada tingginya indeks persepsi korupsi, menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta pencapaian kesejahteraan rakyat yang masih jauh dari harapan, seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, telah terjadi erosi nilai-nilai Integritas. (2) Dalam bidang perekonomian kita tertinggal jauh dari negara-negara lain, karena melemahnya etos kerja, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreativitas, dan semangat inovatif. (3) Sebagai bangsa kita mengalami krisis identitas. Karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat Gotong Royong, saling bekerja-sama demi Kemajuan bangsa meluntur. Kita harus mengembalikan karakter Bangsa Indonesia ke watak luhurnya, yaitu Gotong Royong. Dengan melemahnya integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, menyebabkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Meskipun Indonesia sudah masuk dalam kalangan negara berpendapatan menengah, tetapi untuk menjadi negara maju masih banyak upaya yang harus dilakukan. Bangsa Indonesia masih harus bekerja keras. Oleh sebab itu, kita harus menjalankan Revolusi Mental, agar Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.

II

TUJUAN PELATIHAN

1

Sosialisasi tentang program-program Gerakan Nasional Revolusi Mental

2

Pembekalan materi-materi yang akan disebarluaskan dalam pembentukan Gugus Tugas

3

Tata cara dan tahapan pembentukan Gugus Tugas

4

Pembekalan sistem administrasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental

MATERI PELATIHAN

3.1 REVOLUSI MENTAL

3.1.1 Apa Itu Revolusi Mental

Apa itu mental? Akar katanya adalah *mens* artinya jiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan jiwa. Konsep ini berkembang menjadi *mentality* (mentalitas) yang artinya mencakup baik karakteristik dan kapasitas mental, cara dan kapasitas berpikir, merasa dan bertin-mental yang sifatnya terkait erat dengan bentuk karakter yang menjalani serangkaian ran, pelatihan dan demikian, lingkungan berperan membentuk dalam sosiologi, karakter pribadi melainkan ciri suatu kelompok bahkan suatu bangsa (Wirutomo dkk 2014)

Apa itu
Mental?

dak, maupun aktivitas batiniah. Mentalitas karakter. Untuk memperkuat, orang perlu proses pembelajaran. Dengan sosial dan fisik ikut karakter individu. Di ter tidak hanya bersifat juga bisa menunjuk-

Revolusi Mental yang dimaksudkan oleh Jokowi mencakup juga karakter bangsa ini, bukan sekadar kondisi jiwa perorangan. Jadi yang harus mengalami revolusi adalah seluruh masyarakat Indonesia. *Revolusi Mental adalah usaha untuk mengubah karakter bangsa Indonesia. Nantinya perubahan di level masyarakat itu*

akan mendorong individu menyesuaikan diri di dalamnya. (Wirutomo dkk. 2014)

Bila revolusi Mental diartikan sebagai revolusi untuk membenahi karakter bangsa secara revolusioner (cepat dan mendasar), maka ada beberapa **asumsi dasar yang perlu disepakati**, yaitu:

1 Karakter bangsa adalah sesuatu yang terbentuk sebagai respon terhadap kondisi sosial budaya tertentu yang dialami oleh bangsa itu dalam perjalanan sejarah selama bertahun-tahun. Jadi kita yakin bahwa kualitas mental (karakter) bangsa kita saat ini bisa diubah, bisa diperbaiki.

2 Kata “revolusi” yang digunakan disini merujuk kepada serangkaian tindakan yang cepat dan mendasar. Revolusi adalah menjebol dan membangun, tanpa membangun yang terjadi adalah anarkis. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Revolusi Mental dilaksanakan secara cepat, masif, terorganisasi, terencana, teratur, dan terukur.

3 Revolusi adalah suatu gerakan seluruh masyarakat (pemerintah bersama rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali beberapa nilai yang secara strategis amat diperlukan oleh Masyarakat (Bangsa dan Negara) Indonesia untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya dan memenangkan persaingan dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

4 Perlu kita pahami bahwa secara sosiologis kondisi karakter bangsa kita yang buruk (tidak mandiri, individualistik, koruptif, tidak kreatif dan sebagainya) sudah tertanam dalam kebudayaan kita dalam kurun waktu yang panjang. Jadi revolusi Mental harus mengubah sebagian dari kebudayaan bangsa yang mengalami “pembusukan”, sekaligus juga mengembangkan unsur-unsur positif kebudayaan kita yang perlu dipertahankan. Jadi persoalan mental bangsa sebenarnya adalah masalah “kebudayaan” (Wirutomo dkk 2014)

Apa itu kebudayaan? Kebudayaan bukan sekadar “kesenian” atau benda peninggalan kuno, makna kebudayaan jauh lebih luas dari itu. Kebudayaan adalah konsep yang sangat mendasar bagi berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat. Seorang pakar mengatakan: “Manusia adalah makhluk yang dijerat oleh jaring-jaring yang dirajutnya sendiri, jaring-jaring itu adalah kebudayaan”.

Kita dibentuk oleh kebudayaan, tetapi pada dasarnya kita yang membentuk kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya apa yang kita miliki, melainkan juga apa yang mendefinisikan kita. Siapa kita ditentukan oleh kebudayaan kita. Jadi kalau kita hendak membenahi kebudayaan, kita harus ingat bahwa kebudayaan itu sendiri merupakan kekuatan yang telah membentuk sikap dan perilaku kita dari luar dan dari dalam. Maka, upaya meningkatkan kualitas budaya itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. (Wirutomo dkk, 2014)

Selo Soemardjan (1964), mengajukan definisi sebagai berikut.

“Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang akan menjadi sebuah pacuan bagi kehidupan bermasyarakat guna mencapai kehidupan yang sejahtera”.

Rasa adalah segala unsur kemampuan spiritual manusia seperti sistem kepercayaan (misalnya agama dan sebagainya), sistem nilai (moral, etika, estetika), norma (hukum tertulis maupun tak tertulis), simbol dan sebagainya.

Cipta adalah kemampuan intelektual masyarakat (kemampuan intelektual, kedalaman dan daya tahan berpikir, kemampuan menghasilkan hal-hal baru, kemampuan analisis dan sebagainya).

Karya segala baik masa lalu maupun masa kini seperti kemampuan dan hasil ciptaan material dan nonmaterial (candi, seni tari, musik, lukis, pahat sampai karya teknologi seperti pabrik, gedung, mobil, pesawat dan sebagainya). Semua unsur kebudayaan itu harus digerakkan atau dikembangkan oleh karsa atau kehendak, usaha, perjuangan dari masyarakat (Wirutomo dkk 2014)

Presiden Joko Widodo mencanangkan Revolusi Mental, sebab mentalitas merupakan suatu ekspresi sikap dan perilaku yang bisa menjadi indikator kualitas suatu kebudayaan. Jadi Revolusi Mental adalah sentral dan mendasar untuk mendorong perubahan budaya bangsa (Wirutomo dkk 2014).

3.1.2 Revolusi Mental sebagai Upaya Pembangunan Sosial-Budaya

Revolusi Mental adalah perubahan yang sifatnya sistemik yaitu mencakup semua sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, dan agama, tetapi juga mencakup elemen-elemen dasar dari kehidupan kemasyarakatan, yaitu

3 ASPEK GERAKAN REVOLUSI MENTAL

Aspek Struktural

Revolusi Mental bisa terlaksana bila terjadi perubahan atau perombakan yang mencakup Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah dan sebagainya, termasuk kekuatan Pasar yang memiliki kemampuan “memaksa” dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat.

Aspek Kultural

Mencakup segala sistem nilai, norma, kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging (*internalized*) pada individu atau masyarakat sehingga memiliki “kekuatan” membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat (dari dalam). Revolusi Mental juga harus mencakup perubahan-perubahan pada aspek budaya.

Aspek Prosesual

segala “dinamika interaksi” sehari-hari antar anggota masyarakat. Jadi Revolusi Mental juga dapat dikembangkan oleh setiap warga masyarakat mulai dari obrolan di warung kopi, celotehan di dunia maya sampai diskusi di TV maupun di Ruang Seminar, interaksi antar guru dan murid, polisi dan warga masyarakat, sampai perdebatan di Gedung Parlemen bahkan demonstrasi di jalanan). Revolusi Mental harus memberi ruang pada segala jenis proses sosial, sehingga semua individu maupun kelompok dapat mengekspresikan aspirasi dan opininya, dapat bernegosiasi antar anggota masyarakat, sehingga “arena” ini dapat menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada (“social order is a negotiated order”). (Wirutomo dkk, 2014)

Revolusi Mental bergerak pada ketiga aspek, yaitu struktur, kultur, dan proses karena ketiganya saling mempengaruhi, saling berpotongan dan saling menopang. Kerusakan pada aspek Kultur yang kita alami saat ini, misalnya Etos kerja yang rendah, disiplin yang rendah, ketertiban yang rendah, sebenarnya bukan merupakan karakter asli dari budaya kita, tetapi merupakan akibat dari kesalahan-kesalahan secara Struktur, misalnya kebijakan Pembangunan, undang-undang, dan peraturan. Maka kerusakan secara Kultur dapat diperbaiki dengan pembangunan pada aspek Struktur. Karena itu Gerakan Nasional Revolusi Mental harus dimulai dengan perbaikan aspek Struktural terutama dari pihak Pemerintah.

Di dalam Revolusi Mental aspek struktural, kultural dan prosesual saling mempengaruhi, saling berpotongan (saling menopang).

3.1.3 Tujuan Gerakan Nasional Revolusi Mental

1. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar Trisakti.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

3.1.4 Prinsip Gerakan Nasional Revolusi Mental

1

Revolusi Mental **bukan proyek pemerintah**, tetapi gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia

2

Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan Pemerintah

3

Harus bersifat **lintas-sektoral**

4

Partisipasi antara Pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, dan akademisi

5

Diawali oleh **program pemicu (gempuran nilai)** untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkret dan cepat

6

Desain program harus **ramah pengguna**, populer, menjadi bagian dari gaya hidup, dan sistematis holistik

7

Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan **mengatur kehidupan sosial (moralitas publik)**, dan bukan mengatur moralitas privat

8

Dampaknya **dapat diukur**

3.1.5 Nilai-nilai Strategis Instrumental Gerakan Nasional Revolusi Mental

1. INTEGRITAS

Jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab, dan konsisten

Integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata, dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika.

Revolusi Mental mengajak setiap insan manusia Indonesia untuk dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta konsisten dalam menjalankan perilaku-perilaku tersebut. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral, serta berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan maka seseorang sudah dapat dikatakan bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya.

Hal tersebut cukup untuk menjadi modal kita agar dapat dipercaya oleh orang lain. Konsistensi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab juga menjadi salah satu kunci penerapan nilai integritas.

Pada tataran kolektif, nilai integritas dapat memandu masyarakat untuk menampilkan komitmen pada apa yang menjadi tugasnya serta dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Di tataran negara, nilai ini dapat dipercaya dapat mendorong aparaturnya pemerintahan untuk bekerja secara profesional, transparan, jujur, dapat diandalkan, dan terpercaya. Dengan nilai ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara Negara dapat meningkat karena masyarakat percaya bahwa aspirasinya dijalankan dengan baik.

2. ETOS KERJA

Mandiri, etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, dan produktif

Etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif

Etos kerja sebagai semangat yang menjadi ciri khas dan keyakinan individu/kelompok dalam bekerja. Keyakinan tersebut dapat disepakati secara formal atau informal dalam suatu kelompok.

Mandiri adalah keyakinan mengenai pentingnya mengandalkan pada usaha dan kemampuan diri sendiri/negara sendiri dari pada yang diberikan atau disediakan oleh orang lain/ negara lain.

Daya saing dapat diartikan sebagai kapasitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan rill-nya.

Optimis dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk selalu mencari peluang dari setiap kesulitan yang dihadapinya.

Inovatif dapat diartikan sebagai suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekililingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru atau orisinil dan bermanfaat bagi orang banyak.

Produktif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk selalu menghasilkan dan digunakan secara lebih baik dan teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Ketika kita mampu mengendalikan diri sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan dan mampu menemukan cara baru dalam bekerja serta mampu menyelesaikan pekerjaan yang berdampak luas maka beberapa permasalahan dan pekerjaan rumah dari bangsa ini dapat lebih cepat untuk terselesaikan.

3. GOTONG ROYONG

Kerja sama, solidaritas, tolong menolong, peka, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Gotong royong dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien.

Nilai gotong royong merupakan nilai yang telah dikenal lama oleh bangsa Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu kita. Nilai gotong royong perlu dipelihara oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah bangsa ini.

Gotong royong melibatkan kesadaran setiap lapisan masyarakat, dimulai dari diri sendiri hingga pada level pemerintahan dan bangsa Indonesia. Gotong Royong dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama.

Selain itu, semangat solidaritas juga mendorong kerjasama antar individu dan antar kelompok. Ketika solidaritas telah terbentuk, maka kepentingan individu atau sekelompok masyarakat dapat dikesampingkan terlebih dahulu untuk kepentingan umum. Kekuatan-kekuatan dan sumber daya yang dimiliki setiap orang disumbangkan dalam semangat kebersamaan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas.

Nilai-nilai Strategis Instrumental adalah nilai-nilai yang dianggap mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa dan mampu memenangkan bangsa dalam persaingan Global saat ini. Ini bukan “nilai sakral” secara moral (agama), tetapi bersifat universal dan strategis. Melalui nilai strategis instrumental, Revolusi Mental menekankan pada terbentuknya “Moralitas Publik”, sedangkan moralitas privat yang sifatnya individual tetap dikembangkan dalam kehidupan agama, keluarga, sekolah dan sebagainya. Revolusi Mental dicapai melalui kegiatan kegiatan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

3.2 PROGRAM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM)

3.2.1 Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Berdasarkan perubahan aspek struktur, kultur, dan prosesual yang berhasil dilakukan di berbagai negara lain, langkah-langkah rentang waktu GNRM mengikuti tahapan sebagai berikut

TAHAP PERTAMA 2015-2016	Fokus pada sosialisasi, diseminasi dan pembentukan Gugus Tugas agen-agen perubahan yang melibatkan Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat pada tahun 2015-2016. Tujuan tahapan ini adalah meningkatkan rasa memiliki semua unsur pelaku perubahan terhadap gerakan.
TAHAP KEDUA 2016-2017	Fokus pada partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan oleh Penyelenggara Negara yang didukung oleh berbagai pendukung gerakan dari dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya ketaatan pada hukum dan praktik pencegahan serta pemberantasan korupsi.
TAHAP KETIGA 2017-2018	Fokus pada Penyelenggara Negara dan masyarakat yang melayani, bersih dan tertib , yang berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan yang diberikan Penyelenggara Negara dan pelayanan yang diberikan antar sesama masyarakat yang didukung oleh ketertiban dan kebersihan lingkungan.
TAHAP KEEMPAT 2018-2019	Fokus pada Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu , yang mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia tengah mengalami tahapan proses transformasi menuju budaya yang diharapkan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.

Empat tahap tersebut diatas merupakan tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan gerakan. Kesuksesan gerakan ini memerlukan kepemimpinan berbasis keteladanan pada semua simpul perubahan dan semua tingkatan kepemimpinan, baik pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan maupun masyarakat.

3.2.2 Strategi Gerakan Nasional Revolusi Mental

Strategi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan sasaran GNRM, maka ditetapkan 5 (lima) strategi GNRM 2015-2019 sebagai berikut:

No	Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Keberhasilan
1	Membuat payung hukum pelaksanaan GNRM dan meningkatkan penegakan hukum yang didukung oleh sistem, tata kelola pemerintahan dan praktik meritokrasi	1. Semua Kementerian/ Lembaga	Tersedianya payung hukum pelaksanaan GNRM dalam bentuk Instruksi Presiden
		2. Penegak hukum	Penegak hukum melaksanakan kegiatannya dengan mengacu pada 3 (tiga) nilai Revolusi Mental
2	Menguatkan rasa memiliki para Penyelenggara Negara melalui Reformasi Birokrasi untuk membangun budaya birokrasi yang melayani dan berintegritas	Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat	Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat secara aktif melaksanakan 5 (lima) program GNRM baik di pusat maupun daerah
3	Melakukan praktik simpul-simpul perubahan dalam gerakan untuk membangun inisiatif dan partisipasi semua pelaku GNRM	1. Gugus Tugas GNRM	Terbentuknya Gugus Tugas GNRM di pusat dan daerah
			Terlaksananya 5 (lima) Program GNRM oleh Gugus Tugas

		2. Penyelenggara Negara	Penyelenggara Negara menepati disiplin terhadap prosedur, biaya dan waktu pelayanan
			Penyelenggara Negara menerapkan Sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan mengacu nilai-nilai instrumental GNRM
			Penyelenggara Negara menyampaikan dokumen Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAPARATUR SIPIL NEGARA) terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4	Melakukan praktik keteladanan berbasis nilai-nilai Revolusi Mental di semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan	Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat	Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat mendapatkan apresiasi mengacu pada praktik GNRM.
5	Menjadikan portal http://www.revolusimental.go.id sebagai platform gerakan bersama	1. Masyarakat	Tersosialisasikannya hak dan kewajiban masyarakat melalui berbagai medium tersegmentasi.
		2. Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan GNRM oleh berbagai komponen di pusat dan daerah
			Berfungsinya Portal GNRM sebagai media komunikasi strategis.

Dengan menjalankan 5 strategi gerakan tersebut di atas, pada tahun 2016 GNRM diharapkan telah dapat melakukan perubahan pada kondisi kolektif bangsa yang :

- 1. Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mengacu pada RPJMN**
- 2. Tercapainya Indeks Persepsi Korupsi mengacu pada RPJMN**
- 3. Banyaknya Panutan Revolusi Mental pada berbagai K/L, dunia usaha dan masyarakat**
- 4. Banyaknya Praktik Partisipasi Masyarakat dalam GNRM**
- 5. Banyaknya Praktik Revolusi Mental sebagai bagian dari gaya hidup, sebagai jatidiri bangsa kembali**

Secara detail, sasaran, indikator dan Roadmap dari kegiatan GNRM untuk setiap tahunnya dapat dilihat pada bagian lampiran modul ini.

Pada tahun 2016, untuk target tanggal 17 Agustus 2016 ini adalah tumbuhnya agen perubahan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

3.2.3 Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2015

3.2.4 Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2016

3.2.5 Pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gambar 1. Empat Pelaku Utama GNRM

3.2.6 Peran Strategis Penyelenggaraan Negara

Berikut ini adalah bagan yang memperlihatkan peran strategis Penyelenggara Negara dalam kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan mendukung dan menguatkan Gugus Tugas

● Kedaulatan Politik ● Kemandirian Ekonomi ● Kepribadian dalam Kebudayaan

Gambar 2. Bagan Peran Strategis Penyelenggara Neraga

Gerakan Nasional Revolusi Mental mencakup pada lima gerakan sosial, yaitu :

1. Gerakan Indonesia Melayani
2. Gerakan Indonesia Bersih
3. Gerakan Indonesia Tertib
4. Gerakan Indonesia Mandiri, dan
5. Gerakan Indonesia Bersatu

Pada tahun 2016 kegiatan GNRM berfokus pada gerakan sosial: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, dan Gerakan Indonesia Bersih. **Komposisi perubahan 70% berfokus pada peningkatan pelayanan publik oleh ASN dan 30% berfokus pada partisipasi masyarakat.**

3.3 GERAKAN INDONESIA MELAYANI

KASUS: PELAYANAN PUBLIK BURUK

Sumber gambar: <http://theposkamling.com/wp-content/uploads/2012/07/image0121.jpg>

“Sekitar 50% unit pelayanan DKI tidak memenuhi standar. Padahal standar pelayanan wajib dipenuhi agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan publik sekaligus menghindari praktik pungutan liar yang merugikan publik,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana melalui pesan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Temuan itu sejalan dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Jumlah laporan yang diterima lembaga negara pengawas pelayanan publik ini hingga November 2013, tercatat 1.565 laporan. Mereka mengeluhkan tentang pelayanan publik yang merujuk ke pemerintah daerah, khususnya DKI. Bila dipersentase, jumlahnya sebesar 43,2 persen dari 3.621 jumlah total laporan yang masuk ke Ombudsman.

Sumber berita:

<http://news.liputan6.com/read/767516/ombudsman-50-dinas-di-dki-tidak-penuhi-standar-pelayanan-publik>

KASUS: PELAYANAN PUBLIK BAIK

Pemkab Batang Fasilitasi Pengobatan Penderita Sakit Jiwa

Sumber Gambar: <http://upkp2.batangkab.go.id/wp-content/uploads/nuryatin-600x330.jpg>

Di tingkat kabupaten, Bupati Batang dalam acara diskusi publik “Diseminasi Hasil Evaluasi Eksternal Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2)” 29 April 2016, Yoyok, menegaskan bahwa pelayanan publik yang dirintis Kabupaten Batang harus terus ditingkatkan. Melalui pelayanan publik yang baik akan bisa menegaskan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kabupaten Batang telah merintis UPKP2 sejak tahun 2012 dengan melibatkan masyarakat sipil dari berbagai organisasi. Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik di lokasi-lokasi layanan publik seperti rumah sakit sangat penting karena kerap terjadi kasus yang menimpa masyarakat kecil yang dikecewakan atau dilanggar hak-haknya. Untuk mengantisipasi kejadian semacam itu, pemerintah Kabupaten Batang tengah merintis adanya pos pengaduan langsung di rumah sakit umum pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai petugas pos pengaduan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Batang.

Sumber berita:

<http://presidenri.go.id/reformasi-birokrasi/model-pelayanan-publik-dari-kabupaten-batang.html>

Bagaimana kondisi pelayanan publik di daerah Anda? Adakah hal-hal yang masih perlu diperbaiki? Mari diskusikan bersama apa yang bisa dilakukan untuk mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik?

a. Deskripsi Gerakan Indonesia Melayani

Gerakan Indonesia Melayani adalah gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik aparatus sipil negara yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gerakan Indonesia Melayani berupaya untuk mengubah pola pikir/paradigm penyelenggaraan pelayanan publik dari semula berorientasi pada “pemerintah sebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada “kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”.

Gerakan Indonesia Melayani merupakan gerakan yang berangkat dari permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia dipandang belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat menuntut agar mutu pelayanan yang disediakan pemerintah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya Gerakan Indonesia Melayani diharapkan terdapat peningkatan pelayanan publik pada setiap instansi. Gerakan Indonesia Melayani juga dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah timbulnya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nilai Gotong Royong belum mampu terimplementasi, contohnya pelayanan terpadu untuk urusan yang bersifat lintas sektoral (*cross-cutting*) yang dilakukan secara bergotong royong, seperti untuk perizinan.

Gerakan Indonesia Melayani nantinya akan menghasilkan sebuah SOP Pelayanan Publik Prima yang di dalamnya meliputi sistem, yaitu pelayanan publik yang dilakukan kepada masyarakat harus jelas, mudah, dan memiliki keterbukaan terkait dengan prosedur pelayanan, serta setiap pelayanan publik memiliki tenggat waktu yang pasti dalam merespon masyarakat. Pelayanan publik juga harus berlandaskan pada prinsip etos kerja serta memiliki standar dalam melayani masyarakat.

Terakhir, pelayanan publik harus menciptakan sinergitas untuk menyediakan material petunjuk pelayanan dan menyediakan sebuah sistem untuk masyarakat memberikan tanggapan terhadap pelayanan publik yang mereka peroleh. Gerakan Indonesia melayani memiliki sasaran pemanfaat, yaitu birokrat dan seluruh masyarakat Indonesia.

b. Tujuan Gerakan Indonesia Melayani

Secara umum, Gerakan Indonesia Melayani ditujukan untuk meningkatkan pembiasaan perilaku pelayanan publik yang baik, terutama di kalangan PNS.

Secara khusus, Gerakan Indonesia Melayani ditujukan untuk :

1. Terselenggaranya pelatihan ASN tentang pelayanan publik prima
2. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*E-government*);
4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
5. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan

c. Indikator Keberhasilan

No	Program	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	1. Aparatur Sipil Negara mendapatkan pemahaman / sosialisasi tentang Revolusi Mental
			2. Materi modul pelatihan disetiap unsur Penyelenggara Negara memuat Revolusi Mental
2	Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum	Aparatur Sipil Negara dan Penegak Hukum	1. Aparatur Sipil Negara menepati jam kerja 2. Aparatur Sipil Negara menepati target waktu pelaksanaan tugas 3. Penegak hukum melaksanakan disiplin jadwal sidang 4. Penegak hukum melaksanakan penyelesaian kasus sesuai target

3	Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e - government)	Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian/ Lembaga melaksanakan pelayanan 1 (satu) pintu 2. Pelayanan publik memiliki waktu penyelesaian yang jelas 3. Pelayanan publik selesai sesuai waktu yang ditetapkan 4. Kementerian/ Lembaga yang memberikan pelayanan on line terintegrasi
4	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini WTP atas laporan keuangan 2. Indeks Reformasi Birokrasi
5	Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif	Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Integritas Nasional 2. Indeks Integritas Pelayanan Publik Pusat 3. Indeks Integritas Pelayanan Publik Daerah 4. Instansi pemerintah yang akuntabel
6	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)	Aparatur Sipil Negara	Peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan
7	Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)	Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilaksanakan per hari 2. Layanan mudah diakses oleh masyarakat 3. Waktu untuk mendapatkan layanan 4. Antrian pelayanan

8	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana yang bermanfaat bagi masyarakat 2. Prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat
---	---	-----------------------	---

Turunan indikator keberhasilan yang mendetail dari Gerakan Indonesia Melayani (GIM) adalah tersedianya SOP pelayanan publik prima yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang meliputi:

1. Pembangkitan motivasi: cinta tanah air, motivasi dan semangat bekerja lebih baik
2. Perubahan Sistem:
 - a. Kejelasan, kemudahan, dan keterbukaan informasi mengenai prosedur layanan;
 - b. Memiliki tenggat waktu yang pasti dalam merespon
3. Etos Kerja
 - a. Responsif terhadap masukan dan keluhan
 - b. Cepat
 - c. Akurat
 - d. Disiplin
 - e. Transparan dan Akuntabel
4. Standar perilaku dalam melayani
 - a. Sopan
 - b. Ramah
5. Sinergitas penyediaan material petunjuk pelayanan dan sistem tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik
6. Pelayanan terpadu untuk urusan-urusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (lintas sektoral)

3.4 GERAKAN INDONESIA BERSIH

Kasus: Membuang Sampah Sembarangan

Sumber gambar: <http://cde.peru.com/ima/0/1/0/9/9/1099896/924x530/multimedia-actualidad.jpg>

Sampah konsumsi warga perkotaan itu ternyata banyak yang tidak mudah terurai, terutama plastik. Semakin menumpuknya sampah plastik menimbulkan pencemaran serius. Kondisi ini disadari sebagian masyarakat dengan menumbuhkan upaya pengurangan sampah plastik.

Kantong plastik baru dapat mulai terurai paling tidak selama lebih dari 20 tahun di dalam tanah. Jika kantong plastik itu berada di air, akan lebih sulit lagi terurai.

Hasil riset Jenna R Jambeck dan kawan-kawan (publikasi di www.sciencemag.org 12 Februari 2015) yang diunduh dari laman www.iswa.org pada 20 Januari 2016 menyebutkan Indonesia berada di posisi kedua penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka.

Menurut Riset Greeneration, organisasi nonpemerintah yang 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem.

Data hasil riset tersebut diperkuat oleh kenyataan akhir-akhir ini di sekitar masyarakat Indonesia. Di Kota Banda Aceh misalnya, sampah yang dihasilkan setiap harinya juga sangat banyak.

Sumber artikel: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/indonesia-darurat-sampah>

Kasus: Sistem Pembuangan Sampah Berbasis Komunitas

Sumber gambar: <http://kebersihan.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2016/02/nnn.jpg>

Prinsip-prinsip kebersihan dan pengelolaan sampah ramah lingkungan diterapkan sejak dini di sebuah sekolah menengah atas di Manado, Sulawesi Utara. Para siswa SMA 7 mulai menerapkan pola hidup ramah lingkungan di lingkungan sekolahnya sejak tahun 2007, dengan membuat kompos dari sampah organik dari kantinnya. Beberapa tahun kemudian, sebuah bank sampah resmi didirikan di SMA 7 dan para siswa mulai menyadari untungnya menyimpan botol dan bungkus makanan plastik. Hasil tabungan mereka di bank sampah diakui sejumlah siswa cukup membantu untuk membayar kebutuhan-kebutuhan sekolah. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pun memberi penghargaan khusus bagi SMA 7 karena dianggap sangat berprestasi dalam menerapkan jiwa ramah lingkungan di kalangan siswanya.

Sumber berita:

<http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/bank-sampah-di-indonesia-menabung-mengubah-perilaku>

Bagaimana kondisi lingkungan di daerah Anda? Adakah hal yang masih perlu diperbaiki? Mari diskusikan bersama apa yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku membuang sampah yang buruk menjadi lebih baik?

a. Deskripsi Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Gerakan ini dibuat berdasarkan permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek kebersihan lingkungan. Mentalitas dan perilaku masyarakat Indonesia dalam penanganan dan pengelolaan sampah belum mencerminkan budaya bersih, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, sampah rumah tangga belum dipilah antara sampah organik dan anorganik, serta birokrat dianggap masih setengah hati dalam menangani persoalan sampah adalah contoh kongkrit belum tertanamnya budaya bersih di masyarakat Indonesia.

Dengan dilaksanakannya Gerakan Indonesia Bersih, diharapkan dapat menjadikan bersih sebagai sebuah budaya serta mengubah perilaku dan mental masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, mulai memilah sampah rumah tangga organik dan anorganik, serta birokrat dapat menangani permasalahan kebersihan tersebut dengan kesungguhan hati.

Gerakan Indonesia Bersih memiliki dua fokus, Fokus pertama adalah kepada masyarakat melalui program bank sampah dengan harapan masyarakat memiliki pengetahuan tentang lingkungan bersih, pengelolaan sampah, bank sampah dan nilai keekonomiannya, sehingga setelahnya, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Namun sebelumnya diadakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat.

Fokus kedua adalah kepada pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab (pembuatan dan penegakan peraturan, pembentukan kelembagaan, pendidikan dan intervensi aspek sosial budaya, penganggaran pendanaan, serta mendorong dan mempromosikan teknologi tepat guna). Kedua fokus tersebut dapat terlaksana dengan adanya pemahaman prinsip 3R dan lima aspek pengelolaan sampah

Tujuan Gerakan Indonesia Bersih

1. Menuju pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ditunjang

oleh sarana dan prasarana dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

2. Terciptanya persepsi yang sama mengenai pengelolaan sampah dengan pendekatan lima aspek di para pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah

b. Indikator Keberhasilan Gerakan Indonesia Bersih

No	Program	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2	Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi menuju Indonesia Bebas Sampah 2020 2. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang telah ada
4	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)	Pemerintah	Peraturan perundang-undangan yang disempurnakan
5	Pemberian kemudahan bagi dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan sampah	Dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan izin bagi dunia usaha dan lembaga 2. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah

6	Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) 2. Kualitas MCK 3. Individu/ Rumah Tangga yang berobat 4. Kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan
7	Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	Penegak Hukum dan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan di bidang kebersihan lingkungan 2. Peraturan di bidang kesehatan lingkungan 3. Penegakan hukum di bidang kebersihan lingkungan meningkat 4. Penegakan hukum di bidang kesehatan lingkungan 5. Kebersihan lingkungan terjaga 6. Kesehatan lingkungan terjaga

Secara konkret, detail pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Bersih menetapkan target pencapaian yang disertai dengan indikator ukuran pencapaiannya.

Secara ringkas, berikut adalah turunan target dari Gerakan Indonesia Bersih di tahun 2016:

1. Pengetahuan tentang lingkungan bersih, pengelolaan sampah, bank sampah dan nilai keekonomiannya tersosialisasi dengan baik.
2. Tercapainya kesamaan pemahaman dari perangkat Aparatur Sipil Negara di setiap Provinsi dan Kabupaten/ kota tentang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab
3. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sampah.

Indikator keberhasilan dari Gerakan Indonesia Bersih antara lain:

- 1. Masyarakat yang berpartisipasi sejumlah 7.000 orang
- 2. Terselenggaranya pelatihan dasar mengenai pengelolaan sampah dengan pendekatan lima aspek sebanyak 34 kali pelatihan

d. Langkah Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Bersih adalah salah satu bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mengubah perilaku dan mental masyarakat terkait kebersihan lingkungan serta menjadikan bersih sebagai budaya di Indonesia. Upaya Gerakan Indonesia Bersih adalah membuang sampah pada tempatnya, sampah mulai dipisah oleh rumah tangga, dan Birokrat menangani permasalahan sampah dengan kesungguhan hati.

Langkah pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih dapat dilihat pada bagan berikut ini:

3.5 GERAKAN INDONESIA TERTIB

Kasus: Pelanggaran dan Ketidakaturan Publik

Sumber gambar: <http://assets-a2.kompasiana.com/statics/crawl/55603b980423bdce2e8b4567.jpeg?t=o&v=760>

Budaya antre sepertinya masih jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Saling serobot dan membuat antrean baru meskipun sudah ada jalur antrean sehingga membuat penumpukan antrean dan terjadilah antrean yang tidak tertib. Mengantre seolah menjadi aktivitas yang tidak menyenangkan, mengapa hal tersebut bisa demikian? Apakah karakter orang Indonesia yang memang tidak berdisiplin dan penghargaan terhadap orang lain rendah sehingga membuat antrean sulit sekali tertib?

Sumber artikel: http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/197/Kapan-Bisa-Mengantri-Tertib--Sekarang-Waktunya.html

Kasus: Penegakan Ketertiban

Aksi penghadangan atau penghalangan sepeda motor di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, oleh Alfini Lestari (34) bukan tanpa hambatan. Alfini bercerita, hinaan dan cercaan kerap dilontarkan kepada dirinya saat menghadang sepeda motor dengan tangan kosong.

“Pernah juga (ada yang bilang), ‘dasar cewek berengsek, gila.’ Tetapi, saya tidak peduli. Yang harusnya gila kan mereka, bukan saya. Saya jalan sudah di tempatnya,” kata Alfini saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Sumber Berita:

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/17291751/Alfini.Kerap.Disebut.Gila.Saat.Menghadang.Sepeda.Motor.di.Trotoar.Sudirman>

Bagaimana kondisi ketertiban di daerah Anda? Adakah hal yang masih perlu diperbaiki? Mari diskusikan bersama apa yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku tidak tertib menjadi tertib?

a. Deskripsi Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Tertib adalah salah satu gerakan dalam program GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik, tertib dalam berlalu lintas, dan tertib pada saat antre.

Salah satu permasalahan yang dihadapi di masyarakat Indonesia pada saat ini adalah masih minimnya kesadaran untuk berperilaku tertib seperti tertib pada saat di ruang publik, tertib pada saat berlalu lintas, dan tertib pada saat antre. Tertib merupakan suatu kondisi teratur di mana masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.

b. Tujuan Gerakan Indonesia Tertib

- a. Gerakan Indonesia Tertib diharapkan dapat membangun kesadaran dan menciptakan budaya tertib di masyarakat.
- b. Gerakan Indonesia Tertib diharapkan dapat meningkatkan perilaku tertib masyarakat dalam menggunakan ruang publik, meningkatkan perilaku tertib masyarakat pada saat berlalu lintas, dan meningkatkan perilaku tertib masyarakat pada saat antre.
- c. Gerakan Indonesia Tertib diharapkan dapat memberdayakan agen perubahan dalam menjalankan Gerakan Indonesia Tertib di masyarakat. Agen perubahan merupakan aktor-aktor yang telah ditunjuk untuk menjadi pelopor perubahan menuju Indonesia tertib

c. Indikator Keberhasilan Gerakan Indonesia Tertib

No	Program	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang penggunaan ruang publik 2. Sarana/prasarana penggunaan ruang publik 3. Kenyamanan berkegiatan di ruang publik
2	Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang pengelolaan pengaduan 2. Kualitas penyelesaian pengaduan 3. Jangka waktu pengelolaan pengaduan
3	Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang administrasi kependudukan 2. Penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sesuai 3. Anak yang sudah mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA)
4	Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Tertib Berlalu Lintas 2. Kenyamanan berlalu lintas 3. Sarana dan prasarana jelas untuk alur lalu lintas

5	Peningkatan perilaku antri	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem antri 2. Kenyamanan mengantre 3. Perilaku antri di lokasi pelayanan publik 4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perilaku antri
6	Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi pendanaan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang perilaku tertib 2. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat
7	Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib	Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang perilaku tertib 2. Penegak hukum yang melaksanakan perilaku tertib
8	Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kebahagiaan 2. Peraturan perlindungan terhadap perempuan 3. Peraturan perlindungan terhadap anak 4. Sosialisasi bahaya narkoba 5. Sosialisasi bahaya kekerasan

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam Gerakan Indonesia Tertib pada tahun 2016, yaitu:

- a. Peningkatan perilaku tertib di Ruang Publik (Parkir, Halte, Stasiun, Terminal, Bandara, Pelabuhan) :
 1. Tertatanya parkir kendaraan
 2. Tertatanya sistem perparkiran (kartu, biaya, helm, sikap petugas, dst)

3. Keteraturan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang kendaraan umum
 4. Tersedianya fasilitas bagi masyarakat (berkebutuhan khusus, lansia, ibu hamil, ibu membawa anak)
 5. Tersedianya petugas penertiban di kendaraan umum
 6. Peningkatan bekerjanya sistem penegakan hukum tertib di ruang publik
- b. Peningkatan perilaku tertib berlalu lintas :
1. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas
 2. Kepatuhan petugas terhadap ketertiban peraturan lalu lintas
 3. Tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan dipahami masyarakat
 4. Peningkatan bekerjanya sistem penegakan hukum tertib lalu lintas
- c. Peningkatan perilaku Antre :
1. Tertatanya sistem antre (tanda masuk dan keluar, garis pembatas antrean, sikap petugas pengarah antrian/satpam, sikap petugas pelayanan antrean, mesin dan kartu antrean)
 2. Tersedianya sarana dan prasarana antre yang memadai
 3. Peningkatan bekerjanya sistem penegakan hukum tertib antre

d. Langkah Pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib

3.6 GERAKAN INDONESIA MANDIRI 2017

Kasus: Konsumtif dan Tidak Produktif

Sumber gambar: <http://www.bilmediginseylervar.com/wp-content/uploads/2015/11/stevecutts11-1024x658.jpg>

Majalah The Economist belum lama ini menempatkan Indonesia di peringkat teratas sebagai pengguna sepeda motor sekawasan Asia Tenggara. Tahun 2010, tak kurang 8 juta unit disapu bersih oleh pasar konsumen lokal dan hanya tersaingi oleh konsumen di China dan India. Masih di tahun yang sama, lebih dari 760.000 unit mobil berbagai kelas terjual laris manis di pasar otomotif. Perusahaan RIM, produsen Blackberry, mengklaim kelas menengah Indonesia salah satu pasar terbesarnya. Ini pun belum apa-apa dibandingkan dengan jumlah pelanggan (kartu telepon) aktif yang mencapai 240 juta.

Mengapa budaya konsumtif mereka menggelora?

Sumber artikel:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/24/02115970/budaya.konsumtif.kelas.menengah>

Kasus: Inovatif

Sumber gambar: <https://i.ytimg.com/vi/D7PMRRs7dnk/maxresdefault.jpg>

Inovator muda Indonesia telah berpartisipasi pada Intel ISEF selama lima tahun terakhir. Sejak Intel ISEF 2012, mereka telah mencatatkan prestasi pada kompetisi tersebut setiap tahunnya. Pada Intel ISEF 2012, Muhammad Luthfi

Nurfakhri dari SMA Negeri 1 Bogor berhasil meraih Third Award untuk proyeknya yang berjudul 'Digital Leaf Color Chart'.

Sementara pada ISEF 2013, Jovita Nathania, Rosinta Handinata, dan Maria Christina Yolenta Lestari dari SMA Tarsisius 1 Jakarta juga meraih penghargaan serupa dengan proyek berjudul 'Having Fun Learning about Coral'.

Kemudian pada Intel ISEF 2014, Muhtaza Aziziya Syafiq dan Anjani Rahma Putri dari SMA Negeri 2 Sekayu, Sumatera Selatan memenangi Development Focus Award dari USAID dan Third Award untuk proyek mereka yang berjudul 'Green Refrigerant Box'.

Pada Intel ISEF 2015, Luca Cada Lora dan Galih Ramadhan dari SMA Negeri 1 Surakarta berhasil meraih Fourth Award dengan proyek mereka yang berjudul 'Packed VolcASH: An Inorganic Nature of Heavy Metals Adsorbent'. Selain mereka berdua, I Dewa Ary Palguna dan I Kadek Sudiarsana dari SMAN Bali Mandara Singaraja, juga meraih penghargaan yang sama melalui proyek berjudul 'The Motifs Development of Gringsing Sarong'.

Sumber artikel:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/02/190744326/Inovasi.untuk.Masa.Depan.Dunia>

Bagaimana kondisi kemandirian ekonomi di daerah Anda? Adakah hal yang masih perlu diperbaiki? Mari diskusikan bersama apa yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan inovatif?

a. Deskripsi Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mendorong terwujudnya perilaku kreatif, inovatif, serta beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan UMKM, peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya, serta berbagai peningkatan kemandirian terutama nilai etos kerja yang berguna dalam menghadapi persaingan regional dan global.

b. Tujuan Gerakan Indonesia Mandiri

1. Meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia
2. Mendukung, mendorong, serta meningkatkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan apresiasi dalam seni, inovasi, dan kreativitas

c. Indikator Keberhasilan Gerakan Indonesia Mandiri

No	Program	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan	Pemerintah dan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR)
2	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Pemerintah dan Masyarakat	1. Wirausaha Baru 2. Indeks Ekonomi Kreatif
3	Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional	Koperasi dan UMKM	1. Kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi 2. Iklim baik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4	Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 2. Angka Penetapan Budaya Nasional 3. Meningkatnya kegiatan Pagelaran/pameran seni dan budaya
5	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Desa Membangun 2. Indeks Pembangunan Desa 3. Indeks Pembangunan Daerah tertinggal
6	Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan produk dalam negeri 2. Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan komponen dalam negeri
7	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Penyediaan Lapangan Pekerjaan 2. Jumlah tenaga kerja terlatih 3. Jumlah Lembaga/ Balai pelatihan tenaga kerja berkualitas
8	Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Sumber Daya Penelitian Ekonomi, Pangan dan Energi 2. Pemanfaatan Hasil Litbang 3. Kapasitas SDM litbang
9	Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana; 2. Jumlah produksi pangan; 3. Terpenuhinya kebutuhan energi; 4. Jumlah impor pangan (menurun).

10	Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	Penggunaan hasil litbang teknologi dalam negeri
11	Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 2. Sosialisasi HAKI 3. Pendaftaran dan Pemeliharaan HAKI
12	Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman tentang persaingan usaha 2. Perbaikan Pemahaman tentang nilai-nilai persaingan usaha
13	Pemberian penghargaan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa	Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penghargaan 2. Pemberian penghargaan
14	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data dan informasi peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan 2. Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang disempurnakan
15	Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.	Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Peraturan terhadap pelaku usaha yang tidak sehat 2. Penegakan terhadap pelanggaran perilaku usaha yang tidak sehat

3.7 GERAKAN INDONESIA BERSATU 2017

KASUS: INTOLERANSI

Sumber gambar: http://media.viva.co.id/thumbs2/2011/09/12/122881_kerusuhan-ambon_663_382.jpg

Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat.

Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling menyerang dan bakar membakar bangunan serta sarana ibadah.

Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini.

Sumber artikel: <http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia>

KASUS: TOLERANSI

Sumber gambar: <http://cimg.antaranews.com/manado/2011/08/ori/20110820foto-toleransi-umat-beragama1.jpg>

Bagi sejumlah pemuda di Cirebon momen ini digunakan untuk saling bantu membantu agar perayaan kedua hari raya tersebut berjalan dengan lancar.

Sugianto, seorang anggota dari organisasi masyarakat bernama Pelita (Pemuda Lintas Agama) mengatakan

dirinya dan beberapa pemuda anggota lainnya membantu perayaan Maulid Nabi di sebuah universitas di Cirebon, meski bukan penganut agama Islam.

“Dalam membantu itu kita menyiapkan segala sesuatunya, baik angkut-angkut kursi, soundsystem (sistem suara), perlengkapan lain seperti dekorasi, lalu dalam hal ini juga kita berbagi tugas soal parkir,” kata Sugianto.

Di lain pihak, pemuda yang beragama Islam juga membantu umat Kristen mempersiapkan acara untuk Natal.

“Udah dua hari ini bantu-bantu, nyiapin persiapan Natal. Itu bentuk dari kegiatan sosial karena Pelita kan orientasinya menjaga kerukunan umat beragama, di bidang sosialnya, bukan teologinya,” ucap Haryono yang juga tergabung dalam Pelita.

Sumber artikel:

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151224_indonesia_toleransi_agama

Bagaimana kondisi persatuan di daerah Anda? Adakah hal yang masih perlu diperbaiki? Mari diskusikan bersama apa yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku intoleransi menjadi toleransi?

a. Deskripsi Gerakan Indonesia Bersatu

Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

b. Tujuan Gerakan Indonesia Bersatu

- 1. Gerakan Indonesia Bersatu bertujuan meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi di masyarakat
- 2. Gerakan Indonesia Bersatu bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang harmonis di masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap kaum minoritas dan marjinal
- 3. Gerakan Indonesia Bersatu bertujuan untuk meningkatkan inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan Indonesia
- 4. Gerakan Indonesia Bersatu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia

c. Indikator Keberhasilan Gerakan Indonesia Bersatu

No	Program	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila	Pemerintah dan Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia
2	Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama	Pemerintah dan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama

3	Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku/modul kewarganegaraan 2. Pendidikan/pelatihan kewarganegaraan
4	Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Wawasan Kebangsaan 2. Kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa
5	Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan terhadap pengakuan dan perlindungan kaum minoritas dan marjinal 2. Kaum minoritas dan marjinal yang dilibatkan dalam kegiatan 3. IKRAR
6	Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran 2. Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat 3. Produksi Produk dalam negeri
7	Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor	Pemerintah dan Masyarakat	Indeks Integritas Sektor Publik

8	Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa	Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Hukum Indonesia 2. Penegakan hukum terhadap pelaku kriminal 3. Penegakan hukum terhadap pelaku anarkis
9	Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum pendidikan keagamaan yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti 2. Lembaga pendidikan agama yang mengajarkan keagamaan, toleransi dan budi pekerti 3. Rasa aman di masyarakat 4. Interaksi sehat dan saling percaya di masyarakat
10	Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun	Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Toleransi antar Umat Beragama 2. Materi dan informasi tentang pentingnya nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun

3.8 GUGUS TUGAS REVOLUSI MENTAL

3.8.1 Deskripsi Gugus Tugas Revolusi Mental

Untuk mengejawantahkan Gerakan Nasional Revolusi Mental sangat diperlukan suatu kekuatan pendukung yang nyata dan terorganisasi dalam suatu Gugus Tugas Gerakan Aksi Bersama antara Pemerintah dengan lintas kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Akademis. Gugus Tugas Revolusi Mental hadir sebagai motor penggerak Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pendamping Program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memiliki jaringan dari tingkat nasional hingga tingkat provinsi atau bahkan kabupaten/kota. Gugus Tugas Revolusi Mental ini diharapkan dapat menggalang partisipasi aktif para agen perubahan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia.

Gugus Tugas Revolusi Mental merupakan jaringan pengorganisasian non-sektoral yang beranggotakan 4 komponen utama masyarakat yaitu birokrat, pengusaha, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, akademisi yang secara khusus menggerakkan, melakukan aksi konkret, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dengan kata lain, Gugus Tugas Revolusi Mental bersifat sebagai motor penggerak dan pendamping bagi Gerakan Nasional Revolusi Mental itu sendiri. Gugus Tugas Revolusi Mental diidentifikasi ke dalam dua bentuk, yaitu Gugus Tugas Revolusi Mental Nasional dan Gugus Tugas Revolusi Mental Daerah-Provinsi. Gugus Tugas Revolusi Mental Nasional merupakan jaringan berskala nasional yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh nasional yang memiliki jaringan luas dan pengaruh berskala nasional dan berkomitmen di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi merupakan jaringan pengorganisasian yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh lokal yang menjadi motor penggerak utama dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerahnya masing-masing.

Gugus tugas Revolusi Mental merupakan lembaga fungsional dalam birokrasi pemerintah dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gugus Tugas ini tidak berbentuk kementerian atau departemen, karena kebudayaan bukanlah sektor, tetapi *bersifat cross-sectoral*. Gugus Tugas Nasional langsung berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi PMK untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, *built-in* monitoring (bukan penindakan tapi penjaminan mutu), evaluasi melalui pengukuran statistik/*scoring*. Bekerja melalui penelitian, diskusi, pengkajian, kerjasama dengan lembaga penelitian dalam negeri dan swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta.

3.8.2 Struktur Gugus Tugas Revolusi Mental

GUGUS TUGAS KEMENTRIAN DAN LEMBAGA

GUGUS TUGAS PROVINSI

GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA

3.8.3 Visi dan Misi Gugus tugas Revolusi Mental

Visi

Dalam kurun waktu lima tahun Bangsa Indonesia mampu melaksanakan Revolusi Mental untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas karakter bangsa, sehingga pembangunan di segala sektor kehidupan bisa mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan negara lain di Era Globalisasi secara lebih kreatif dan mandiri.

Misi

Gugus tugas Revolusi Mental Nasional dan Propinsi serta Sekretariat Gugus tugas Revolusi Mental bertanggung jawab untuk membantu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Presiden dalam mengelola revolusi mental melalui kemitraan dan koordinasi dengan semua Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pemerintah tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, Departemen, Lembaga Negara, Pemerintah Propinsi. Dalam pengelolaan termasuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut pengembangannya.

3.8.4 Tujuan Gugus Tugas Revolusi Mental:

1. Menyiapkan agen perubahan
2. Merumuskan strategi dan langkah
3. Melakukan sosialisasi Revolusi Mental kepada masyarakat luas
4. Menggerakan aktivitas revolusi mental

3.8.5 Peran Gugus Tugas Revolusi Mental Nasional

Gugus Tugas Revolusi Mental Nasional berada di bawah Menko PMK langsung dan bertugas untuk membantu (1) merumuskan strategi dan langkah revolusi mental; (2) menyosialisasikan Revolusi Mental kepada masyarakat luas; (3) melakukan penelitian mengenai hal-hal terkait

revolusi mental, (4) merumuskan kerangka dasar revolusi mental; (5) menggerakkan aktivitas revolusi mental (6) memantau jalannya revolusi mental; dan (7) mengevaluasi pelaksanaan revolusi mental dsb.

Sebagai Lembaga yang non Departemental dan didirikan oleh Pemerintah dan *Civil Society*, pengusaha, maka lembaga ini adalah bukan sepenuhnya Birokrasi Pemerintah, sehingga irama kerjanya lebih leluasa dan luwes. Dengan cara ini daya jangkau pengaruhnya bisa jauh lebih besar ke masyarakat. Dalam mengembangkan rencana perlu melakukan berbagai kajian sosial, lembaga, literatur, analisis internal, dan analisis eksternal (PEST) untuk masukan dalam merumuskan kebijakan, strategi, program, proyek, peraturan, standard, pedoman dan lain-lain. Data kajian perlu mendefinisikan secara tajam dan terinci tentang tujuan, ruang lingkup, strategi dan teknik pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dari konsep revolusi mental. Dalam merumuskan rencana strategi perlu melibatkan semua *stakeholder* terkait, termasuk para tokoh masyarakat di seluruh daerah. Setelah tersusun rencana strategis merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman dan program. Dengan bantuan para pakar, sistem nilai itu harus dioperasionalkan menjadi azas kerja dan prioritas capaian bagi semua Kementerian secara spesifik. Misalnya: Kementerian Perdagangan harus membuat kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri mendorong sikap gotong-royong (saling dukung dan saling membantu antar pelaku ekonomi nasional: lemah, menengah dan kuat), membangkitkan sikap mandiri dan kreatif pada seluruh warga bangsa dan menghindari praktek korupsi. Demikian pula target kerja bagi Kementerian Agama, Kesehatan, Pendidikan Nasional, Perbankan dan lain-lain, semua harus ikut mengembangkan kelima nilai tersebut melalui bidang kerja masing-masing. Mengopersikan nilai-nilai strategis instrumental secara rinci beserta indikatornya dan indeks pengukurannya untuk dijadikan bahan instruksi Presiden. Pada akhirnya hal ini akan membantu Presiden mengukur hasil capaian kinerja setiap Departemen dan Lembaga Negara dalam mendukung perubahan sikap mental masyarakat Indonesia.

3.8.6 Peran Gugus Tugas Revolusi Mental Propinsi

Gugus Tugas Revolusi Mental Propinsi adalah gugus tugas yang berkedudukan di 34 Propinsi. Gugus Tugas Revolusi Mental memiliki tugas:

1. Membentuk Tim Sekretariat Gugus Tugas Propinsi
2. Menyiapkan sistem administrasi dan manajemen gugus tugas Propinsi
3. Merancang program aksi untuk gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib (2016) dan Indonesia Mandiri, Bersatu (2017) dengan bersinergi serta melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi serta tokoh masyarakat (tokoh agama, kelompok difable, kaum muda, perempuan, netizen, insan media, dll)
4. Melakukan rembuk rembuk warga dan stakeholder untuk perancangan program bersama.
5. Melaksanakan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat (min 10 komponen masyarakat),
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program program yang dilaksanakan.
7. Menghasilkan agen agen perubahan
8. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan video) tentang program yang dilakukan.

3.8.7 Strategi Gugus Tugas Revolusi Mental

1. **Merancang dan Melakukan aksi nyata yang berdampak luas dan cepat** pada perubahan perilaku sesuai nilai nilai strategis instrumental (Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
2. **Melakukan penelitian**, kajian ilmiah, publikasi, seminar, pertemuan

ilmiah, dan lokakarya tentang nilai-nilai strategis-instrumental yang sudah disepakati untuk mendapatkan masukan lebih jauh.

3. **Mengembangkan kerja sama antarsektor**, antarlembaga, antar disiplin ilmu pengetahuan, organisasi masyarakat, para budayawan, ilmuwan dan tokoh masyarakat untuk merumuskan kondisi budaya bangsa saat ini, apa kekuatan yang kita miliki dan apa kelemahan yang ada.
4. **Meningkatkan efektivitas manajemen Revolusi Mental**. Setiap akhir tahun perkembangan nilai-nilai tsb. harus dievaluasi oleh lembaga profesional yang independen (non pemerintah) pada masing-masing sektor pembangunan (pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan, politik, hukum dsb.). Mengembangkan indikator indikator dampak outcome dan impact untuk mengukur keberhasilan nilai-nilai strategis. Melakukan Monev terhadap impak pelaksanaan nilai-nilai strategis. Membuka ruang pengaduan daerah. Apresiasi prestasi per daerah, departemen. Memberikan rekomendasi dan laporan kepada Presiden sebagai eksekutor.
5. **Mendorong kebijakan yang mendukung Revolusi Mental di Indonesia**. Peraturan Pemerintah, menjadi landasan hukum untuk pedoman pelaksanaan revolusi mental. Memfasilitasi pengembangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mendukung revolusi mental dalam rangka perubahan menuju Indonesia lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
6. **Membentuk unsur Gugus Tugas Revolusi Mental tingkat-tingkat daerah**
7. **Mengembangkan program dan kegiatan konkret**, seperti Gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu, berkolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha dan masyarakat sipil termasuk kelompok difable (melibatkan berbagai komponen masyarakat)

3.8.8 Langkah-langkah Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental

3.8.9 Kriteria Anggota Gugus Tugas:

1. Tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai komponen masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat, sedikitnya 10 komponen masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaum penyandang disabilitas.
2. Pernah atau sedang berkontribusi aktif dalam melakukan perubahan menuju Indonesia lebih baik relevan dengan Gerakan Indonesia Melayani, Bersih dan Tertib.
3. Mampu menjadi motor penggerak perubahan.
4. Memiliki komitmen kerja dan ketertarikan pada isu Gerakan Nasional Revolusi Mental
5. Inovatif, kreatif.

3.8.10 Metode Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental

Gugus Tugas Revolusi Mental dibentuk dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) atau Kelompok Diskusi Terarah Gerakan Nasional Revolusi Mental di setiap provinsi. **Pelibatan** (*engagement*) dan **Pendampingan** merupakan kata kunci utama dalam pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi atau Nasional. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat termasuk warga biasa dan kelompok penyandang disabilitas yang penting, berpengaruh dan relevan harus terlibat dalam pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah gerakan bersama bukan gerakan pemerintah saja untuk melakukan perubahan menuju Indonesia lebih baik.

a. Tujuan FGD

1. Sosialisasi tentang program-program Gerakan Nasional Revolusi Mental
2. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental dan Sekretariat

Gugus Tugas Revolusi Nasional yang difasilitasi oleh pihak Universitas setempat dan unsur pemerintah daerah.

3. Perancangan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah (Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib) 2016 dan Indonesia Mandiri dan Bersatu (2017) dengan format *Logical Frame work* sederhana. (lihat Lampiran)
4. Pembagian Kerja bersama dalam pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental (Indonesia Melayani, Bersih, Tertib)

b. Deskripsi Kegiatan FGD

FGD pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental dilakukan melalui dua tahap:

1. Sosialisasi tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental,
2. Diskusi kelompok kerja untuk perancangan program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib untuk tahun 2016, masing-masing kelompok harus melibatkan minimal 10 komponen masyarakat termasuk didalamnya kelompok penyandang disabilitas,
3. Diskusi pleno untuk pembangunan komitmen.

Kegiatan FGD pembentukan gugus tugas difasilitasi oleh universitas daerah terkait. Tugas universitas setempat adalah:

1. Mengirimkan wakil untuk mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan fasilitator di Jakarta
2. Membentuk tim peneliti (maksimum 6 orang) yang terdiri atas fasilitator FGD dan notulen
3. Melakukan pengolahan data
4. Membuat laporan
5. Dokumentasi kegiatan

Komponen Masyarakat yang perlu terlibat dalam FGD Revolusi Mental Propinsi antara lain:

Kelompok 1:

**Gerakan Indonesia
Melayani**

1. Komponen ASN
2. Komponen Pelaku Usaha
3. Komponen Pendidik (Guru, Dosen)
4. Komponen Budayawan dan Seniman
5. Komponen Tokoh Agama
6. Komponen Tokoh Politik
7. Komponen Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Komponen Akademisi Organisasi dan Profesi
9. Komponen Pemuda & Mahasiswa
10. Komponen Tokoh Perempuan
11. Komponen Insan Media
12. Komponen Netizen (Aktif dan Berpengaruh di Dunia Internet/Online/Maya/Virtual)
13. Komponen Difabel dan lain lain

Catatan : Dua orang perwakilan dari masing-masing komponen

Kelompok 2:

**Gerakan Indonesia
Bersih**

1. Komponen ASN
2. Komponen Pelaku Usaha
3. Komponen Pendidik (Guru, Dosen)
4. Komponen Budayawan dan Seniman
5. Komponen Tokoh Agama
6. Komponen Tokoh Politik
7. Komponen Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Komponen Akademisi Organisasi dan Profesi
9. Komponen Pemuda & Mahasiswa
10. Komponen Tokoh Perempuan
11. Komponen Insan Media
12. Komponen Netizen (Aktif dan Berpengaruh di Dunia Internet/Online/Maya/Virtual)
13. Komponen Difabel dan lain-lain

Catatan : Dua orang perwakilan dari masing-masing komponen.

Kelompok 3:**Gerakan Indonesia
Tertib**

1. Komponen ASN
2. Komponen Pelaku Usaha
3. Komponen Pendidik (Guru, Dosen)
4. Komponen Budayawan dan Seniman
5. Komponen Tokoh Agama
6. Komponen Tokoh Politik
7. Komponen Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Komponen Akademisi Organisasi dan Profesi
9. Komponen Pemuda & Mahasiswa
10. Komponen Tokoh Perempuan
11. Komponen Insan Media
12. Komponen Netizen (Aktif dan Berpengaruh di Dunia Internet/Online/Maya/Virtual)
13. Komponen Difabel dan lain-lain

Catatan : Dua orang perwakilan dari masing-masing komponen

c. Keluaran FGD Revolusi Mental Propinsi

1. Persamaan persepsi mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental dan program Gerakan Nasional Revolusi Mental
2. Terbentuknya Gugus Tugas Revolusi Mental di 34 Provinsi
3. Rancangan program Gugus Tugas Revolusi Mental di 34 Provinsi (Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib) yang sistematis, terencana, dan masif

d. Indikator Keberhasilan FGD Revolusi Mental Propinsi

1. Terbentuknya Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi
2. Beroperasinya Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi, dalam hal:
 - a. Didesainnya program-program Gerakan Nasional Revolusi Mental berbasis masyarakat yang inovatif, kreatif, dan

dapat dilaksanakan serta diikuti oleh berbagai komponen masyarakat

- b. Adanya agen perubah (changer leader dan change maker) dari setiap komponen masyarakat
- c. Adanya perubahan perilaku yang terukur pada level individu dan masyarakat (yang ditunjukkan dengan pelayanan yang lebih baik, lingkungan lebih bersih, dan masyarakat yang lebih tertib)

e. Instrumen FGD

Instrumen FGD Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental

Pengantar:

Salam Revolusi Mental,

Konsep Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilontarkan Presiden Joko Widodo ternyata mendapat sambutan luas di masyarakat. Itu artinya rakyat mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia sedang mengalami krisis atau degradasi serius dan perlu segera diperbaiki bahkan dengan tindakan yang revolusioner. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat tugas membangun dan mengembangkan Gugus Tugas Revolusi Mental. Kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan pandangan, opini dan masukan untuk menjadi bagian dan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pertanyaan:

Topik 1. Gugus Tugas Revolusi Mental

1. Siapa aktor utama yang harus memimpin Gerakan Nasional Revolusi Mental? Bagaimana agar Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat berjalan dari aspek kelembagaan dan kebijakan?
2. Apa peran yang dapat dilakukan pemerintah dan komponen masyarakat lain dalam rangka melakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental?
3. Bagaimana komitmen Anda untuk menjadi bagian dari Gugus Tugas Revolusi Mental?
4. Menurut bapak/ibu hambatan (aktor, institusi, dan lain lain) apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental?
5. Menurut bapak/ibu potensi apa saja yang dapat mendukung dalam mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental?

Topik 2. Aksi Konkret dalam Gerakan Indonesia Melayani (GIM)

1. Apa masalah utama di daerah Anda terkait pelayanan publik yang perlu perubahan secara cepat?
2. Apa potensi yang dimiliki daerah Anda yang relevan dengan persoalan pelayanan publik?
3. Apa kegiatan konkret yang dapat dilakukan (prioritas) untuk Gerakan Indonesia Melayani 2016?
4. Apa tujuan dari kegiatan tersebut?
5. Apa output yang dihasilkan (sesuatu yang dapat diukur) dari kegiatan tersebut?
6. Apa outcome dari kegiatan (dampak)?
7. Apa indikator keberhasilan kegiatan tersebut?

Topik 3. Aksi Konkret dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB)

1. Apa masalah utama di daerah Anda terkait kebersihan lingkungan yang perlu perubahan secara cepat?
2. Apa potensi yang dimiliki daerah Anda yang relevan dengan persoalan kebersihan lingkungan?
3. Apa kegiatan konkret yang dapat dilakukan (prioritas) untuk Gerakan Indonesia Bersih 2016?
4. Apa tujuan dari kegiatan tersebut?
5. Apa output yang dihasilkan (sesuatu yang dapat diukur) dari kegiatan tersebut?
6. Apa outcome dari kegiatan (dampak)?
7. Apa indikator keberhasilan kegiatan tersebut?

Topik 4. Aksi Konkret dalam Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

1. Apa masalah utama di daerah Anda terkait ketertiban yang perlu perubahan secara cepat?
2. Apa potensi yang dimiliki daerah Anda yang relevan dengan persoalan ketertiban?
3. Apa kegiatan konkret yang dapat dilakukan (prioritas) untuk Gerakan Indonesia Tertib 2016?
4. Apa tujuan dari kegiatan tersebut?
5. Apa output yang dihasilkan (sesuatu yang dapat diukur) dari kegiatan tersebut?
6. Apa outcome dari kegiatan (dampak)?
7. Apa indikator keberhasilan kegiatan tersebut?

IV. KONSEP PELATIHAN

LAMA PELATIHAN

Pelatihan secara keseluruhan akan berlangsung selama 12 jam 15 menit

30%

Penyampaian materi

50%

Simulasi

20%

Tugas

BOBOT PELATIHAN

METODE PELATIHAN

Metode pelatihan diadakan dengan mengombinasikan berbagai metode, diantaranya: presentasi, tanya jawab, diskusi, berbagi pengalaman, permainan, musik, simulasi, studi kasus, maupun diskusi kelompok terarah.

Fasilitator pelatihan akan menjelaskan materi pelatihan dan membimbing peserta pelatihan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah/ instansi peserta pelatihan.

FASILITATOR

INSTRUMEN

- Slide Presentasi
- Modul Pelatihan
- Spidol
- Meta plan
- Karton

V. EVALUASI PELATIHAN

EVALUASI

- **Pre Test : tes kecil pada sesi awal pertemuan**
- **Post Test: tes kecil pada sesi akhir pertemuan**

Peserta pelatihan dengan nilai tertinggi akan mendapatkan insentif dari pihak penyelenggara pelatihan.

VI. LAMPIRAN

PETA JALAN REVOLUSI MENTAL:

DRAF INPRES GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia
 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara;
 8. Para Gubernur;
 9. Para Bupati/Walikota.

- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada 5 (lima) program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi:
- a. Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada:
 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
 2. Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
 3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*);
 4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
 5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
 6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (*deregulasi*);
 7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (*debirokratisasi*);
 8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
 9. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan

10. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
- b. Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada:
1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas;
 2. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
 4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 5. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
 6. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 7. Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- c. Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada:
1. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
 2. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
 3. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;

4. Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas;
 5. Peningkatan perilaku antri;
 6. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
 7. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
 8. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
- d. Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada:
1. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
 2. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 3. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
 4. Peningkatan apresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya;
 5. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
 6. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
 7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja;
 8. Peningkatan penelitian dan pengembangan di

- bidang ekonomi, pangan, dan energi;
9. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
 10. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
 11. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;
 12. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
 13. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
 14. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
 15. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
- e. Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada:
1. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
 2. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
 3. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
 4. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus;
6. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;
7. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
8. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
9. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti; dan
10. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.

KETIGA : Pelaksanaan 5 (lima) program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani;
- b. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih;

- c. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib;
- d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri; dan
- e. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu.

KEEMPAT : Koordinator masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menyampaikan hasil pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Khusus kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan:
 - a. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

- c. pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental yang anggotanya berasal dari unsur Gugus Tugas kementerian/lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gerakan Nasional Revolusi Mental di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi mental di provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Nasional dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ir. H. JOKO WIDODO

Perancangan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental
Tahun 2016

NO			DESKRIPSI	
1	Tujuan (perubahan yang diharapkan, jangka panjang)	1		
		2		
2	Outcomes (hasil atau perubahan yang diharapkan terjadi setelah berbagai aktivitas dilakukan dan sudah berjalan dalam jangka menengah)	1		
3	Output (Hasil yang langsung dapat dilihat, dirasakan setelah melakukan aktivitas)	a.1		
		a.2		
		b.1		
4	Kegiatan:			
		a.1.1		
		a.1.2		
		b.1.1		

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

Budimanta, Arief, et al. (2015). *Buku Saku Seri 2: Panduan Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental*. [PDF Dokumen]

Cahaya, Kahfi Dirga. (2016). *Alfini Kerap Disebut "Gila" Saat Menghadang Sepeda Motor di Trotoar Sudirman*. "Megapolitan Kompas" [<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/17291751/Alfini.Kerap.Disebut.Gila.Saat.Menghadang.Sepeda.Motor.di.Trotoar.Sudirman>], diakses tanggal 14 Mei 2016 Pukul 20.00.

Damanik, Janiaton. (2011). *Budaya Konsumtif Kelas Menengah*. "Kompas.com" [<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/24/02115970/budaya.konsumtif.kelas.menengah>], diakses tanggal 13 Mei 2016, Pukul 18.30.

Diputra, Rizka. (2016). *Lima Konflik SARA Paling Mengerikan Ini Pernah Terjadi di Indonesia*. "News Okezone" [<http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia>], diakses tanggal 14 Mei 2016 Pukul 22.19.

Draft Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental [Doc Dokumen]

Kerangka Acuan Kerja Program 2016. [Doc Dokumen]

Keteng, Andi Muttya. (2013). *Ombudsman: 50% Dinas di DKI Tidak Penuhi Standar Pelayanan Publik*. "Liputan6". [<http://news.liputan6.com/read/767516/ombudsman-50-dinas-di-dki-tidak-penuhi-standar-pelayanan-publik>], diakses tanggal 15 Mei 2016 pukul 19.00

Lumakto, Giri. (2015). "Kompasiana" [<http://assets-a2.kompasiana.com/statics/crawl/55603b980423bdce2e8b4567.jpeg?t=o&v=760>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20.15.

Oktara, Diko. (2015). *Indeks Pelaksanaan HAM Pemerintah Jokowi-Kalla Turun*. "Tempo.co". [<https://m.tempo.co/read/news/2015/12/09/063726341/indeks-pelaksanaan-ham-pemerintah-jokowi-kalla-turun>]. Diakses tanggal 20 Juni 2016, Pukul 00:29.

Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2015-2019 [Doc Dokumen]

Primus, Josephus. (2016). *Inovasi untuk Masa Depan Dunia*. "Bisnis Keuangan Kompas". [<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/02/190744326/Inovasi.untuk.Masa.Depan.Dunia>], diakses tanggal 14 Mei 2016, Pukul 18.45.

- Pradani, Gagas. (2016). *Mengolah Sampah dari Rumah*. "Kebersihan.jakarta.go.id" [<http://kebersihan.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2016/02/nnn.jpg>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 21.00
- Rismawan, Wahyu. (2014). "YTIMG" [<https://i.ytimg.com/vi/D7PMRRs7dnk/maxresdefault.jpg>], diakses tanggal 12 Mei 2016 Pukul 20.07.
- Salim, Randy. (2013). *Bank Sampah di Indonesia: Menabung, Mengubah Perilaku*. "World Bank". [<http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/bank-sampah-di-indonesia-menabung-mengubah-perilaku>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20.30
- Soemarjan, Selo, dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tim Program dan Roadmap Revolusi Mental. (2016). *Roadmap & Program Revolusi Mental*. [PPT Slide]
- Washarti, Rizki. (2015). *Umat Islam dan Kristen Tunjukkan Toleransi di Hari Raya*. "BBC Indonesia". [http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151224_indonesia_toleransi_agama], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 23.10.
- Wirutomo, Paulus, Daisy Indira Yasmine, dan Ryan Febrianto. (2014). *Revolusi Mental Dari Kami Ke Kita: Usulan Rencana Strategis, Laporan Pokja Revolusi Mental Tim Transisi*. [PDF Dokumen]
- Wirutomo, Paulus. (2012). *Sosiologi untuk Jakarta*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta
- Yuwanto, Listyo. (2014). *Kapan Bisa Mengantri Tertib? Sekarang Waktunya*. "Ubaya" [http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/197/Kapan-Bisa-Mengantri-Tertib--Sekarang-Waktunya.html], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20.29
- "Aktual". (2015). [<http://www.aktual.com/wp-content/uploads/2015/11/antarafoto-drama-pengibaran-bendera-merah-putih-291115-mrh-1.jpg>], diakses tanggal 20 Mei 2016, Pukul 22.00 WIB
- "Antaranews". (2011). [<http://cimg.antaranews.com/manado/2011/08/ori/20110820foto-toleransi-umat-beragama1.jpg>], diakses tanggal 14 Mei 2016 Pukul 19.37.
- "BeritaDaerah". (2015). [<http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2015/01/333-1024x681.jpg>], diakses tanggal 20 Mei 2016, Pukul 22.00 WIB.

"Bilmediginseylervar". (2015). [<http://www.bilmediginseylervar.com/wp-content/uploads/2015/11/stevecutts11-1024x658.jpg>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20.07.

"CDE Peru". (n.d). [<http://cde.peru.com/ima/0/1/0/9/9/1099896/924x530/multimedia-actualidad.jpg>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 22.12.

"Detik.com". (2015).

[https://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/03/4d7e6af2-c6a6-48df-a831-7a15841b4d10_916.jpg?w=620&mark=undefined&image_body_visual_id=131339], diakses tanggal 20 Mei 2016, Pukul 22.10 WIB.

"Kementerian Keuangan Republik Indonesia". (2015). *Indeks Daya Saing Global Indonesia Duduki Peringkat 37 dari 140 Negara*. [<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari-140-negara>]. Diakses tanggal 20 Juni 2016, Pukul 00:31.

"National Geographic Indonesia". (2016). *Indonesia Darurat Sampah*. [<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/indonesia-darurat-sampah>], diakses tanggal 22 Mei 2016 Pukul 15.19.

"Media Viva". (2011). [http://media.viva.co.id/thumbs2/2011/09/12/122881_kerusuhan-ambon_663_382.jpg], diakses tanggal 12 Mei 2016 Pukul 20.00.

"Media Viva". (2013). [http://media.viva.co.id/thumbs2/2013/01/21/189030_batik-tulis_663_382.jpg], diakses tanggal 20 Mei 2016, Pukul 22.00 WIB.

"Merdeka.com". (2013).

[<http://cdn.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2013/12/12/291815/670x335/ciptakan-budaya-tertib-lalu-lintas-korlantas-luncurkan-website.jpg>], diakses tanggal 20 Mei 2016, Pukul 22.00 WIB.

"PresidenRI.go.id". (2016). *Model Pelayanan Publik dari Kabupaten Batang*. [<http://presidenri.go.id/reformasi-birokrasi/model-pelayanan-publik-dari-kabupaten-batang.html>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 19.58

"ThePoskamling". (2012). [<http://theposkamling.com/wp-content/uploads/2012/07/image0121.jpg>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 19.23

"UPKP2 Batang". (2014). *Pembkab Batang Fasilitas Pengobatan Penderita Sakit Jiwa*. [<http://upkp2.batangkab.go.id/wp-content/uploads/nuryatin-600x330.jpg>], diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20.07.

GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*

ISBN 978-602-408-004-4